

Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes

¹Chamid Sutikno, ^{2*}Shadu Satwika Wijaya, ³Zaula Rizqi Atika, ⁴Ariesta Amanda, ⁵M.H Maab

^{1,3,4,5} Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdaltul Ulama Purwokerto

² Program Studi Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

^{2*} shadu.satwika@unsoed.ac.id

ABSTRACT

Indonesia as a country that has geographical diversity, regional characteristics and culture, makes it Indonesia's potential, especially in the tourism sector. The existence of unique and interesting tourism potential in an area should be utilized through good tourism development. However, the tourism industry in Indonesia is only the stage of development continues to encourage areas with tourism potential. One of which is by promoting the pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Program. The penjalin reservoir is located in Winduaji village, subdistrict Paguyangan, district Brebes is an icon for the village of Winduaji which ultimately inspires the community to form a tourism awareness group. However, due to limited resources, this pokdarwis Winduaji has not been able to maximize tourism potential properly. Based on this, the presence of community service regarding "Assistance Institutional Strengthening of Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in Winduaji Village, Paguyangan Subdistrict, Brebes District" is considered important to carry out.

Keywords; *Social Welfare, Institutionalization of Community-based Joint Enterprises.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negeri yang memiliki keberagaman geografis, sifat dan budaya kedaerahan, menjadikannya sebagai potensi Indonesia terutama dalam bidang kepariwisataan. Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah.

Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik.

Meski demikian, industri pariwisata di Indonesia baru pada tahapan perkembangan dimana tahapan itu sendiri baru terpusat pada beberapa daerah saja. Maka dari itu, untuk menarik wisatawan serta untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, pemerintah setiap tahunnya mengadakan kampanye *Visit Indonesia Year*. Kampanye ini menggerakkan daerah untuk berupaya menyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini mendorong daerah yang berpotensi menjadi tujuan wisata namun belum dikenal masyarakat untuk menggerakkan kampanye *Visit* ini di daerah.

Salah satu pemberdayaan masyarakat dalam bidang kepariwisataan adalah program Pokdarwis yang merupakan singkatan dari Kelompok Sadar Wisata. Program ini diusulkan pada gerakan *Visit Indonesia* tahun 1991 (Disbudpar Kota Semarang, 2012). Kemudian diresmikan pada “Kampanye Nasional Sadar Wisata” yang menyerukan kepada semua daerah untuk membentuk Pokdarwis. Program ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Pokdarwis akan berperan sebagai agen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta untuk membangun peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Program Pokdarwis sendiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diusulkan oleh pemerintah namun hanya mendapat bantuan hukum dan pembinaan. Untuk masalah pengelolaan, Pokdarwis harus mampu mandiri.

Desa Winduaji terletak pada ujung sebelah selatan Kabupaten Brebes sekaligus bertetangga dengan Kabupaten Banyumas. Jumlah penduduk Desa Winduaji ±15.022 jiwa. Desa Winduaji memiliki banyak potensi, diantaranya adalah potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam seperti air yang melimpah ruah, kebun, hutan yang memiliki banyak kandungan air dan masih terjaga sampai saat ini.



Winduaji

Selanjutnya

Desa Winduaji

pada masa penjajahan Belanda, pembangunan waduk ini ditujukan untuk

mencegah kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan dan perikanan. Pelaku dalam sejarah Waduk Penjalin atau saksi hidup yang masih ada adalah Mr. Bram Van Den Berg, pada tahun 1949. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Waduk Penjalin sudah menjadi objek wisata bagi warga sekitar Winduaji, bahkan sudah menjadi destinasi wisata alam bagi masyarakat luas, yang menarik dari waduk ini adalah pemandangan indah seperti air yang jernih, ikan yang berlimpah dan di kelilingi pedukuhan asri serta penduduk yang ramah.

Melihat fenomena dari banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh Desa Winduaji, namun tidak diimbangi dengan tata kelembagaan pengelolaan wisata yang baik, membuat peran pokdarwis Winduaji selama ini kurang maksimal. Kesuksesan pariwisata bukan hanya ditopang oleh baik buruknya destinasi pariwisata saja, melainkan ada beberapa aspek pendukung yang turut menentukan, seperti kemudahan transportasi, keberadaan fasilitas umum, kesiapan pelayanan pariwisata, serta tata kelembagaan pariwisata yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran pengabdian kepada masyarakat mengenai “Pendampingan, Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Desa Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes” dianggap penting untuk dilaksanakan..

B. METODE

Secara umum, pelatihan dimaknai sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan. Sedikit berbeda dengan pengembangan, yakni lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan menengah sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk anggota tingkat bawah (pelaksana). Terdapat enam garis besar metode untuk melakukan pelatihan diantaranya meliputi metode *On The Job*, metode *Vestibule* atau Balai, metode Demonstrasi dan Contoh, metode Simulasi, metode *Apprenticeship* dan metode ruang kelas.

Keenam metode pelatihan tersebut, terdapat satu metode yang relevan digunakan pada penyelesaian permasalahan di Desa Winduaji, yaitu Metode Ruang Kelas. Metode ruang kelas merupakan metode *training* yang dilakukan di dalam

ruangan, walaupun dapat pula dilakukan di area pekerjaan. Aspek-aspek yang dipelajari berupa falsafah, konsep-konsep, sikap, teori-teori dan kemampuan memecahkan masalah. Bentuk *real* metode ruang kelas adalah kuliah, konferensi, studi kasus, bermain peran, dan pengajaran, berprogram (*programmed in struction*). Metode pengembangan memiliki dua bentuk metode yang terdiri dari Metode Pelatihan dan Metode *Understudies*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepariwisataan

Istilah kepariwisataan sebenarnya merupakan gabungan atau cakupan dari beberapa istilah sebelumnya yakni istilah wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Kepariwisataan ini berarti keseluruhan kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan dengan dilengkapi oleh fasilitas dan infrastruktur pendukung yang disediakan oleh para stakeholders pariwisata. Namun unsur yang paling utama dalam suatu pengembangan kepariwisataan adalah unsur daya tarik wisata.

Obyek daya tarik wisata (ODTW) dijelaskan oleh Hadiwijoyo (2012: 49) sebagai suatu bentukan dan fasilitas yang saling berhubungan dan menjadi alasan/sebab wisatawan mengunjungi suatu daerah atau tempat tertentu. Obyek daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: obyek wisata alam atau lingkungan (ekowisata), obyek wisata sosial budaya dan obyek wisata minat khusus (Special Interest).

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/*artificial*.

Menurut Suwena (2010: 88), atraksi atau obyek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga, yaitu 1) *Natural Resources* (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain.

Modal kepariwisataan menurut Suwena (2010: 89) dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata di tempat modal wisata ditemukan (*in situ*) dan di luar tempatnya yang asli (*ex situ*). Atraksi wisata dibedakan lagi menjadi atraksi penahan dan atraksi penangkap wisatawan.

- b. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.

Menurut Sunaryo (2013: 173), aksesibilitas pariwisata dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Menurut French dalam Sunaryo (2013: 173) menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya

- c. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.

Sugiama (2011) menjelaskan bahwa amenitas meliputi “serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi (tempat penginapan), penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (*entertainment*), tempat-tempat perbelanjaan (*retailing*) dan layanan lainnya”. French dalam Sunaryo (2013: 173) memberikan batasan bahwa amenitas bukan merupakan daya tarik bagi wisatawan, namun dengan kurangnya amenitas akan menjadikan wisatawan menghindari destinasi tertentu

- d. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.

Sunaryo (2013: 159) menjelaskan *ancillary service* lebih kepada ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan yang juga mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, telekomunikasi, rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan Sugiama (2011) menjelaskan bahwa *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan destinasi bersangkutan.

- e. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Kelembagaan kepariwisataan dijelaskan dalam UU tentang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009 sebagai “keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, mekanisme operasional serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan”.

Kelembagaan Kepariwisata

Sunaryo (2013: 117) menjelaskan peran dan fungsi dari komponen pelaku usaha maupun pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat maupun Daerah

Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan. Selain itu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan Khusus Pariwisata Nasional (KPPN). Pemerintah daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain (Industri dan Masyarakat) untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

- b. Swasta atau Industri Pariwisata

Organisasi swasta/industri juga dijelaskan dalam UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 angka 7 dan 8 yang berarti orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menjadi penyedia barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Menurut UU tentang kepariwisataan juga dijelaskan bahwa ada dua lembaga swasta yang ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Kedua lembaga swasta tersebut adalah:

- 1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
- 2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang keanggotaannya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata

c. Masyarakat pariwisata

Menurut penjelasan pasal 5 huruf e UU Kepariwisata No.10 tahun 2009 menyebutkan bahwa organisasi masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata yang berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar destinasi yang dikunjungi wisatawan memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja maupun sebagai tuan rumah (*Host*) dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di Desa Winduaji telah dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pengelola Pokdarwis Winduaji, warga masyarakat sekitar dan akademisi (dosen dan mahasiswa) UNU Purwokerto.

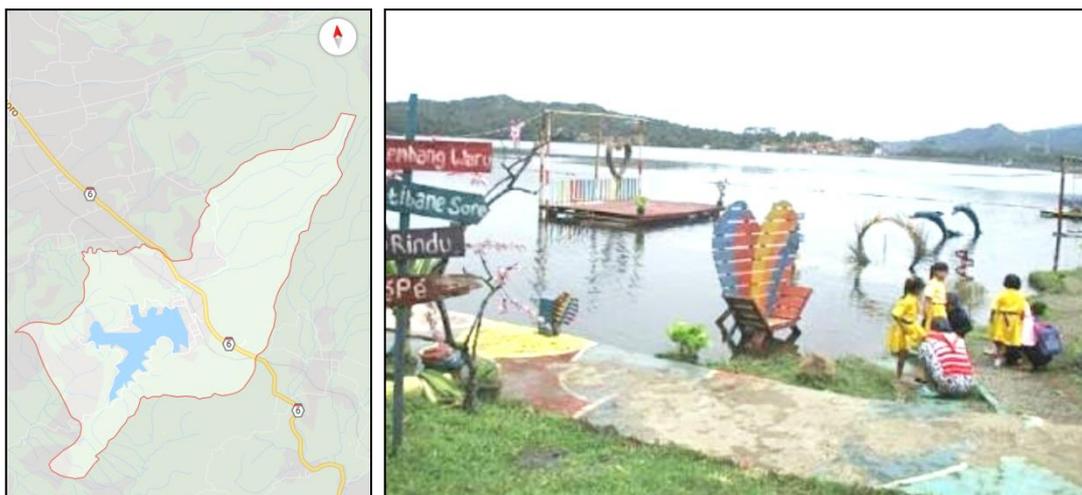


Kegiatan dimulai dengan *opening ceremonial* yang dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan kegiatan pelatihan dalam bentuk *outbond*. Di dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta diajak untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menentukan pengembangan pariwisata di Desa Winduaji. Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Profil Wisata Desa Winduaji

Desa Winduaji terletak di ujung selatan kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan kabupaten banyumas. Dengan jumlah penduduk 20 ribu jiwa, Winduaji merupakan desa terluas di kabupaten brebes. Desa winduaji terbagi menjadi 5 dusun dan 73 RT. Berkenaan dengan wilayahnya yang begitu luas, desa winduaji memiliki aksen berbahasa yang berbeda dengan logat banyumasan pada umumnya. Mata pencaharian masyarakat desa sangat beragam, antara lain: buruh lepas; Petani; Pedagang; Wiraswasta; PNS; sebagian kecil Nelayan dan Pengrajin kayu; serta perantau ke daerah lain.

Desa Winduaji di anugerahi bentang wilayah yang unik, terdiri dari dataran rendah, tinggi, dan sedang, waduk, danau (sumber mata air), bentang hutan pinus dan perkebunan kopi, perbukitan, serta berbagai air terjun (curug), di antaranya curug wadas kemasah, curug musli, curug mangkok, curug jago, curug pengantin. Desa Winduaji juga memiliki petilasan sejarah kebudayaan berupa batu candi, tapak kaki batu,dll.



Waduk Penjalin, sebagai obyek wisata kebanggaan desa winduaji, bangunannya merupakan peninggalan Belanda dan sampai saat ini masih kokoh berdiri. Selain berfungsi untuk bendungan, menampung air, waduk winduaji juga menjadi obyek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Waduk tersebut dikelilingi pegunungan, dan berada di jalur utama antara kabupaten banyumas dan kabupaten brebes. Bukan hanya obyek wisata alam, waduk winduaji juga menyajikan makanan khas winduaji, yaitu nasi nyangku ikan betutu.



Sejak tahun 2016, warga winduaji mulai berbenah untuk mempercantik waduk. Setelah itu, waduk mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan, dan bantuan mulai mengalir. dalam hal ini Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto memiliki peranan yang cukup besar, khususnya dalam mendampingi pengembangan obyek wisata waduk. Pemerintah desa pun mulai mengalokasikan dananya untuk waduk. Beberapa masyarakat pun mulai memanfaatkan waduk penjalin untuk tempat berjualan makanan, minuman, hingga oleh-oleh khas lokal serta souvenir. Tidak ketinggalan makanan khas waduk, yakni nasi nyangku dan ikan betutu.

Aksesibilitas Obyek Wisata Desa Winduaji

Jarak obyek wisata Winduaji dari jalan nasional Banyumas-Brebes sangat dekat. Oleh sebab itu untuk menuju ke lokasi, wisatawan cukup menggunakan jasa ojek, atau menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian lokasi wisata waduk penjalin desa winduaji memiliki prospek kedepan yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh SM dalam kutipan wawancara berikut.

Memang secara letak geografis wisata desa winduaji tidak terlalu jauh dari akses jalan raya sehingga mampu memudahkan para wisatawan, khususnya di daerah banyumas dan sekitarnya.

Fasilitas Penunjang dan Pendukung Pariwisata

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional. Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang.

Saat ini sudah ada beberapa fasilitas wisata yang telah disediakan oleh Pokdarwis, diantaranya:

- a. Peralatan *safety* wahana air seperti pelampung, perahu jukung,
- b. Taman jamur, untuk wisata camping atau *fun game*
- c. *Guide* lokal, yang siap mendampingi wisatawan dalam menikmati keindahan desa Winduaji, termasuk paket *outbond* nya
- d. Paket *sound system*, untuk memenuhi segala kebutuhan ceremonial

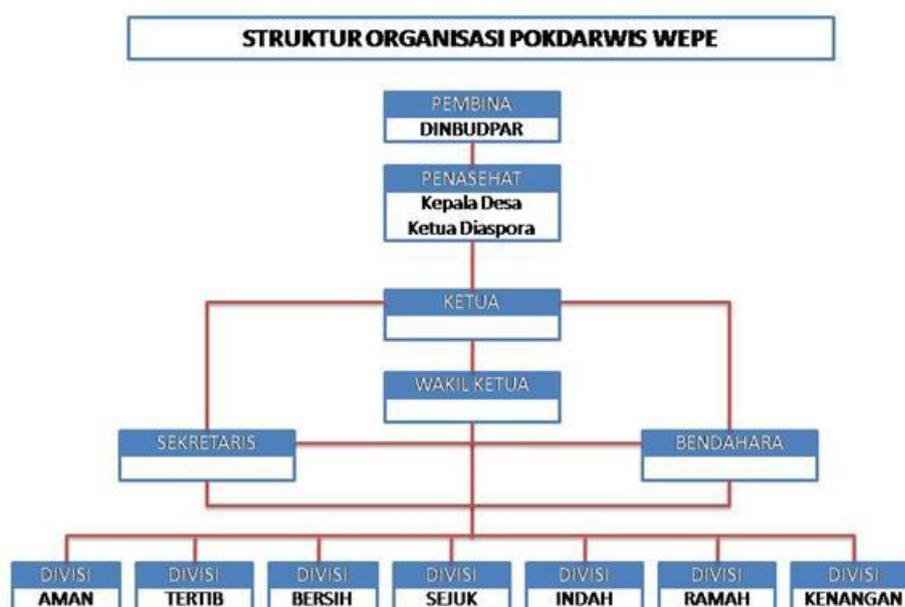
Fasilitas Umum (Ancillary Service) yang Mendukung Kegiatan Pariwisata

Sarana dan fasilitas umum yang menunjang obyek wisata di desa Winduaji memang masih terbatas. Hal ini terjadi karena belum ada kerjasama yang baik antara pengelola obyek wisata dengan stakeholder yang lainnya. Beberapa fasilitas umum yang dapat digunakan sementara ini adalah:

- a. Puskesmas desa yang dekat dengan waduk penjalin dan berada di pusat desa Winduaji
- b. Sarana ibadah yang hampir setiap RT memilikinya
- c. *Homestay* yang tersebar di sekitar waduk penjalin dengan kapasitas rata-rata untuk 10 orang
- d. Sarana parkir yang luas dan memadai untuk kendaraan bermotor dan mini bus
- e. Akses jalan yang halus dan dekat dengan jalan raya nasional

Kelembagaan Pariwisata Winduaji

Pariwisata desa winduaji dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Pembentukan Pokdarwis diawali oleh pergerakan relawan desa winduaji untuk menyelesaikan masalah sampah. Melihat respon masyarakat yang tinggi serta adanya sorotan dari pemerintah, maka pergerakan tersebut diteruskan dengan kegiatan revitalisasi Waduk Penjalin. Pemerintah melalui surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Brebes No: Kadinbudpar Kab. Brebes: 556/ /2017 telah meresmikan kelompok masyarakat tersebut pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan proyek awal Tangga Pelangi dan Taman Jamur di waduk penjalin.



Dalam rangka menunjang aktivitas pengelola, maka masyarakat mendirikan kantor sekretariat Pokdarwis Wepe di Sanggar Edukasi Taman Jamur Edukasi dan Rekreasi Waduk Penjalin Desa Winduaji, Kec. Paguyangan Kab. Brebes 52276. Selanjutnya pengelola secara aktif mempublikasikan obyek wisata waduk penjalin

winduaji melalui berbagai media masa, antara lain dengan membuat akun di instagram (waduk_penjalin) dan facebook (pokdarwis wepe). Pokdarwis Wepe di bentuk dengan tujuan untuk memajukan potensi desa baik SDM maupun SDA yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa dan ikut memajukan pariwisata indonesia pada umumnya, meminimalisir urbanisasi, mengikuti program pemerintah membangun negeri dari desa, menjaga alam desa

Selain penjabaran pengembangan kelembagaan di atas, dalam pengembangan kelembagaan wisata juga mempertimbangkan beberapa hal.

1. *Bossterm* yaitu: suatu pendekatan sederhana yang melihat pariwisata sebagai suatu atribut positif untuk suatu tempat dan penghuninya. Namun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.
2. *The economic-industry approach* (pendekatan ekonomi-industri) yaitu: pendekatan pengembangan pariwisata yang tujuan ekonominya lebih didahulukan dari tujuan social dan lingkungan dan menjadikan pengalaman pengunjung dan tingkat kepuasan sebagai sasaran utama.
3. *The physical-spatial approach* (pendekatan fisik-keruangan), yaitu: pendekatan ini didasarkan pada tradisi penggunaan lahan geografis. Strategi pengembangannya berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip-prinsip keruangan (*spatial*). Misalnya pengelompokan pengunjung di satu kawasan dan pemecahan-pemecahan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Hanya saja kekurangan dari pendekatan ini adalah kurang mempertimbangkan dampak sosial dan kultur dari pengembangan wisata.
4. *The community approach* (pendekatan kerakyatan), yaitu: pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan maksimal dari masyarakat setempat di dalam proses pengembangan pariwisata. Pendekatan ini menganggap pentingnya suatu pedoman pengembangan pariwisata yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*). Pendekatan yang dilakukan adalah menekankan pentingnya manfaat sosial dan cultural bagi masyarakat lokal secara bersama-sama termasuk di dalamnya pertimbangan ekonomi dan lingkungan.
5. *Sustainable approach* (pendekatan keberlanjutan), yaitu: pendekatan berkelanjutan dan berkepentingan atas masa depan yang panjang serta atas

sumber daya dan efek-efek pembangunan ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan cultural dan sosial yang memantapkan pola-pola kehidupan bagi masyarakat setempat.

D. SIMPULAN

Pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata Pokdarwis memiliki peran strategis dalam membangun perencanaan pariwisata. Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional. Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Babo, Nenny R. & Froehlich, Jeffrey W. *"The World Bank CBNRM Initiative"*, 1998
- Damanik, Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Moeljanto, T. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Scherear, S. Bruce. *The Value of Focus Group Research for Social Action Programs*. dalam *Studies in Family Planning*. December 1981.
- Sugiama, A Gima. 2011. *Ecotourism : Pengembangan Pariwisata berbasis konservasi alam*. Bandung : Guardaya Intimarta.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.

Suwena, I Ketut & Widyatmaja, I Gst Ngr. 2010. Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Bali : Udayana University Press.

Sumber lain:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.